



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO



RENCANA KERJA INSPEKTORAT 2022

**INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diperlukan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan.

Untuk melaksanakan rangkaian rencana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan baik jangka menengah (lima tahunan) ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2022 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang pengawasan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat tahun 2022 ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022.

Demikian dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2022 ini dan dengan mengharap limpahan rahmat dari Yang Maha Kuasa, semoga kami mampu meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto,

2021

PK INSPEKTUR
KABUPATEN MOJOKERTO

INSPEKTORAT

Drs. POEDJIWODO

Pembina Tingkat I

NIP. 197004251990031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	
TAHUN 2020.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2020 dan Capaian Renstra Inspektorat	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat.....	20
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	30
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat.....	31
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	35
BAB V PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah rancangan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (yang selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2022. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah sendiri meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Daerah dengan Perkada.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses akhir penyusunan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Bupati Mojokerto tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD menjadi RKPD. Kemudian RKPD Tahun 2022 ditetapkan dengan Perkada sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Mojokerto terdiri atas Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Mojokerto melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto

(Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah), juga dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lain maupun Auditor Eksternal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 merupakan wujud tindak lanjut upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto terpilih.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif “;
- 3) Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional ;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);

- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- 22) Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dimaksudkan agar perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan mampu menjadi pedoman dan tolok ukur Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 adalah arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, agar supaya para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto menjadi terarah dan terukur sesuai dengan perencanaan, serta mampu mencapai keberhasilan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto, serta susunan garis besar isi dokumen adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik berisi tentang latar belakang penyusunan rancangan awal rencana kerja, maksud dan tujuan, dan dasar alternatif penyusunan hubungan dokumen perencanaan lainnya, evaluasi kegiatan tahun lalu, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1) dengan mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat hal-hal yang terkait dengan rencana kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan pendanaannya, yaitu antara lain:

- a. Indikator kinerja
- b. Kelompok sasaran
- c. Lokasi kegiatan
- d. Kebutuhan dana indikatif; dan
- e. Sumber dana

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT

Rencana Kerja Inspektorat tahun 2022 merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026. Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD Inspektorat tahun 2020.

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 APBD Murni Rp. 15.679.322.320,- dan anggaran setelah perubahan perubahan sebesar Rp.13.250.423.253,75,-. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.783.124.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.567.573.932,00. Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut yang terealisasi sebesar Rp.4.137.296.560,00

Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dengan capaian kinerja keuangan sebesar 89% dan capaian kinerja kegiatan sebesar 94% Inspektorat Kabupaten Mojokerto dapat dikategorikan berhasil dengan baik dalam pencapaian kinerja hingga Tahun 2020. Untuk rincian capaian kinerja kegiatan dan keuangan dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel TC 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020
Kabupaten Mojokerto

PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/5)			
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang												
4	2	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan											
4	2	1	Inspektorat Kabupaten										
4	2	1	1	Inspektorat Kabupaten									
4	2	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminstrasi Perkantoran	100%	394%	100%	95,36%	95%	489%	124%

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)					
4	2	1	1	1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat	100%	400%	100%	100,00%	100%		500%	125%
4	2	1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan telepon, air dan listrik	100%	400%	100%	100,00%	100%		500%	125%
4	2	1	1	1	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	Terbayarnya biaya perpanjangan STNK, Pajak Kendaraan dan KIR Kendaraan dinas/operasional	100%	392%	100%	100,00%	100%		492%	125%
4	2	1	1	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pemenuhan Alat Tulis Kantor	100%	400%	100%	95,06%	95%		495%	124%
4	2	1	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	400%	100%	91,47%	91%		491%	123%
4	2	1	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100%	396%	100%	100,00%	100%		496%	125%
4	2	1	1	1	13	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	382%	100%	100,00%	100%		482%	126%
4	2	1	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terbayarnya tagihan surat kabar dan	100%	400%	100%	100,00%	100%		500%	125%

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)					
		tersedianya bahan bacaan lainnya													
4	2	1	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Persentase pemenuhan makanan dan minuman untuk konsumsi rapat tamu	100%	367,20%	100%	98,58%	99%		466%	127%
4	2	1	1	1	21	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Persentase pemenuhan biaya transportasi dan akomodasi untuk rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	100%	400%	100%	88,85%	89%		489%	122%
4	2	1	1	1	23	Penyediaan jasa tenaga kerja	Terbayarnya upah tenaga harian lepas (THL) setiap bulan	100%	400%	100%	100,00%	100%		500%	125%
4	2	1	1	2		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi layak fungsi	100%	361%	100%	74,97%	75%		436%	121%
		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100%	100%	100%	0,00%	0%		100%	100%				
4	2	1	1	2	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya mebeleur	100%	300%	100%	0,00%	0%		300%	100%
4	2	1	1	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase peningkatan kualitas gedung kantor	100%	400%	80%	90,42%	113%		490%	123%

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)					
4	2	1	1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase peningkatan kualitas kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	100%	375%	100%	84,21%	84%		459%	122%
4	2	1	1	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Persentase peningkatan kualitas peralatan kantor yang berfungsi baik	100%	400%	100%	75,16%	75%		475%	119%
4	2	1	1	2		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	100%	100%	0%	0%	0%		100%	100%
						Appraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	Jumlah Laporan Appraisal Pengadaan Tanah Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%
4	2	1	1	3		Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pegawai dengan tingkat kedisiplinan kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	300%	100%	0%	0%		300%	100%
4	2	1	1	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya kain seragam Khaki beserta perlengkapannya	100%	300%	100%	0%	0%		300%	100%

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4 2 1 1 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase Dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja organisasi yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	100%	400%	100%	100%	100%	500%	125%	
4 2 1 1 6 5	Penyusunan Rencana tahunan Dan Laporan Kinerja OPD	Tersusunnya Rencana Dan Laporan Kinerja OPD	100%	400%	100%	100%	100%	500%	125%	
4 2 1 1 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			0				0%		
		Persentase Kesesuaian Penyajian LKPD dengan SAP	100%	400%	100%	100%	100%	500%	125%	
4 2 1 1 20 14	Reviu Laporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	1 LHR	400%	100%	100%	100%	500%	125%	
		Persentase Pemenuhan Kerugian Daerah Sesuai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Obyek Pemeriksaan	92%	288%	90%	100%	111,11%	388%	135%	

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)					
4	2	1	1	20	6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, Inspektorat Provinsi, Irjen	8 kali	388%	90%	100,00%	111%		488%	126%
4	2	1	1	20	19	Pendampingan Pengawasan / Pemeriksaan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Pengawasan / Pemeriksaan pada BPK-RI	3 bulan	200%	90%	100%	111%		300%	150%
						Persentase Penurunan Temuan Berulang Kode 01, 02, dan 03 pada Obyek Pemeriksaan		97%	352%	96%	60%	62%		412%	117%
4	2	1	1	20	7	Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Provinsi dan Nasional	7 kali	400%	96,00%	71,00%	74%		471%	118%
4	2	1	1	20	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Obyek Pemeriksaan yang Diperiksa Sesuai dengan PKPT	216 Obrik	411%	96,00%	193,10%	201%		604%	147%

Kode						Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
4	2	1	1	20	22	Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan APIP yang Diinput	216 LHP	246%	96,00%	83,00%	86%		329%	134%
							Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD Minimal BB	100%	367%	100%	87%	87%		454%	124%
4	2	1	1	20	15	Evaluasi SAKIP OPD	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD	48 LHE	400%	100%	98%	98%		498%	124%
4	2	1	1	20	12	Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah	4 LHR	400%	100%	96%	96%		496%	124%
4	2	1	1	20	16	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKJIP Pemerintah Kab. Mojokerto	1 LHR	300%	100%	100%	100%		400%	133%
							Nilai Hasil Evaluasi SPIP OPD yang dievaluasi	Level 3	Level 2,925	Level 3	Level 2,925	Level 2,925		Level 2,925	Level 2,925
4	2	1	1	20	10	Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Lap	300%	100%	100%	100%		400%	133%
4	2	1	1	20	9	Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP OPD	30 LHE	400%	100%	100%	100%		500%	125%

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)					
4	2	1	1	20	13	Operasional Sapu Bersih Pungutan liar	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Tindaklanjut SABER PUNGLI	4 kali	300%	100%	100,00%	100%		400%	133%
4	2	1	1	20	11	Operasional Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang Disampaikan ke KPK	12 dokumen	300%	100%	100,00%	100%		400%	133%
4	2	1	1	20	2	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Masuk	100%	400%	100%	100%	100%		500%	125%
4	2	1	1	20	17	Reviu Monitoring Penyerapan Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	4 LHR	300%	100%	100%	100%		400%	133%
4	2	1	1	20	20	Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Jumlah OPD yang Ditetapkan WBK/WBBM	30 OPD	195%	100%	100%	100%		295%	151%
4	2	1	1	20	26	Peningkatan Maturitas SPIP Menuju Level 3	Level Maturitas PIP	Level 3	195,00%	100%	100,00%	100%		295%	151%
							Hasil Penjaminan Kualitas APIP dari BPKP	Level 3	Level 2+	Level 3	Level 2+	Level 2+		Level 2+	Level 2+
4	2	1	1	21	6	Operasioanal Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor	Jumlah Kegiatan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan	4 kali	175%	100%	100%	100%		275%	157%

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)					
		Fungsional, P2UPD dan Auditor													
4	2	1	1	21	1	Pelatihan Dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang telah mengikuti diklat	48 orang	500,00%	100%	100,00%	100%		600%	120%
4	2	1	1	21	5	Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Jumlah Kegiatan Pemberian Informasi Hasil Diklat Kepada APIP Melalui Kantor Sendiri	2 kali	200%	100%	100%	100%		300%	150%
4	2	1	1	21	7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Menuju Level 3	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Level 3	Level 3	Level 2+	Level 3	Level 2+	Level 2+		Level 2+	Level 2+
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%							
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%							
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%							

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
6 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%							
6 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%							
6 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai	100%							
6 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									
6 01 02 2 01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Kesesuaian Penyajian LKPD dengan SAP, Persentase Pemenuhan Kerugian Daerah Sesuai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Obyek Pemeriksaan,, Persentase Penurunan Temuan Kode 01, 02, dan 03 pada Obyek Pemeriksaan,, Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD Minimal BB, Nilai	100%							

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Hasil Evaluasi SPIP OPD yang dievaluasi								
6	01	02	2	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Kesesuaian Penyajian LKPD dengan SAP, Persentase Pemenuhan Kerugian Daerah Sesuai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Pada Obyek Pemeriksaan,, Persentase Penurunan Temuan Kode 01, 02, dan 03 pada Obyek Pemeriksaan,, Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD Minimal BB, Nilai	100%			

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016-2021	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan s/d dengan tahun 2016-2019 (n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu (n-2)/2020			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2020	Tingkat Realisasi 2020		Realisasi capaian program dan kegiatan sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
		Hasil Evaluasi SPIP OPD yang dievaluasi								
6	01	03								
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
6	01	03	2	01						
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Hasil Penjaminan Kualitas APIP Dari BKPP	baik nilai						
6	01	03	2	02						
		Pendampingan dan Asistensi	Hasil Penjaminan Kualitas APIP Dari BKPP	baik nilai						

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Mojokerto mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang pemerintahan yaitu peningkatan kualitas pengawasan yang professional dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintah yang good governance. Pengawasan yang profesional memberi arti bahwa aparatur inspektorat dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat, yang keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik.

Terwujudnya good governance mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk berada pada front line perwujudan good governance dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kewajiban moral tersebut diimplementasikan melalui transformasi birokrasi Inspektorat yang menitik beratkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan pengawasan fungsional dengan memperhatikan prinsip-prinsip *accountability, equity, effectiveness* dan *efficiency, responsiveness* serta *transparency*.

Seluruh program kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026 maupun Renstra Inspektorat Kabupaten Mojokerto Periode Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Inspektorat merupakan indikator yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai lembaga pengawasan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat selama lima tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat. Tujuan utama (strategis) Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan mewujudkan pemerintahan yang mampu berjalan pada aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menciptakan organisasi pemerintah yang efektif, efisien, dan memenuhi azas good governance serta mewujudkan birokrasi yang modern.

Tabel 2.2 (Tabel TC-30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	SPM / Standard Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Opini BPK-RI Terhadap LKPD		Opini BPK	WTP	WTP	WTP		WTP	-	WTP	WTP	
2	Persentase Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Selesai Ditindaklanjuti		92%	88%	90%	92%	92%	90%	0%	92%	92%	
3	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		97%	95%	96%	97%	97%	95%	0%	97%	97%	
4	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP OPD dengan Nilai Minimal BB		A	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
5	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2+	Level 2+	Level 3	Level 3	
6	Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 2,925	Level 2,925	Level 3	Level 3	

A. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk pencegahan secara preventif terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan pada Semua Unit Kerja dan Lembaga Pendidikan dengan Obyek Pemeriksaan Laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sebagai pendukung kelancaran koordinasi antara OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Adapun outcome dari kegiatan ini persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02, dan 03 pada obyek pemeriksaan IrbanWil I/II/III/IV dengan output jumlah obyek pemeriksaan yang diperiksa sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

B. Penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penanganan kasus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini

sebagai pendukung kelancaran penanganan kasus yang meliputi : Penanganan Kasus-kasus pengaduan dari masyarakat dan berita dari Surat Kabar, Penanganan Kasus pelimpahan dari Pusat (Kementerian Aparatur Negara, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri) dan Penanganan Kasus pelimpahan dari Gubernur.

Adapun outcome dari kegiatan ini persentase penurunan temuan pada Obyek Pemeriksaan IrbanWil I/II/III/IV dengan output jumlah laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus. Sedangkan realisasi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus mencapai 100% sampai dengan Januari 2020.

C. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pemutakhiran data hasil pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Anggaran yang dialokasikan pada kegiatan ini sebagai pendukung kelancaran pemutakhiran data yang meliputi : Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP maupun Irjen Kementerian Dalam Negeri.

Adapun outcome dari kegiatan ini Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03 pada obyek pemeriksaan IrbanWil I/II/III/IV dengan output jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Propinsi dan Nasional.

D. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2009 dan dilaksanakan dalam bentuk reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan pendampingan dari tim BPKP perwakilan surabaya sehingga akhirnya dapat tersusun laporan hasil reviu sesuai dengan PP 8 Tahun 2006.

Adapun outcome dari kegiatan ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP pada tahun 2019 dengan target kinerja 100%.

E. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan dalam upaya untuk peningkatan pemahaman terhadap SPIP pada setiap OPD. Kegiatan ini menggunakan dana dari APBD Kabupaten Mojokerto.

Adapun outcome dari kegiatan ini Nilai hasil Evaluasi SPIP OPD yang dievaluasi pada level 3, dengan capaian target di Tahun 2020 pada level 2,925 dengan output kegiatan jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPIP yang dievaluasi sebanyak 30 LHE

F. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)

Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2013 telah melaksanakan kegiatan yaitu Pertama, menyusun 7 (tujuh) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/5152/SJ tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2013, terdiri dari:

- 1) Pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi pemerintah daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
- 2) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
- 3) Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi pemerintah daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
- 4) Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
- 5) Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- 6) Publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah;
- 7) Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya hingga 2015 telah menindaklanjuti setiap Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 356/3772/SJ tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ Tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2015, yaitu memenuhi 6 (enam) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Inpres No.7 Tahun 2015 tentang Aksi PPK Tahun 2015 sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 2) Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
- 3) Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 4) Pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan pembantu;
- 5) Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa;

- 6) Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, maupun prosedur perizinan di daerah.

Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya pada tahun 2016-2018 telah menindaklanjuti setiap surat edaran Menteri Dalam Negeri. Penilaian tentang Aksi PPK Kabupaten Mojokerto telah memenuhi target 100%, sehingga Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan dengan baik bertanggungjawab dalam pelaksanaan aksi daerah PPK dan pencapaian target serta ukuran keberhasilan sebagaimana telah disepakati.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN MOJOKERTO

Seiring dengan tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih bersih berwibawa, dan berintegritas guna mendorong tercapainya kemakmuran yang berkeadilan sosial, dan untuk mendukung amanat yang dimuat dalam peraturan-peraturan pemerintah pusat yang mengharuskan organisasi pemerintahan untuk menjadi organisasi yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel, serta untuk menindaklanjuti isu-isu terkini yang berkembang di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto menetapkan isu-isu strategis sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Penguatan birokrasi yang bersih;
2. Penguatan integritas ASN;
3. Penguatan SPIP di masing-masing Perangkat Daerah;
4. Peningkatan pemahaman ASN terkait pengelolaan keuangan daerah;
5. Peningkatan kepatuhan pengelola keuangan terhadap ketentuan;
6. Peningkatan sistem pengawasan yang efektif; dan
7. Peningkatan Kapabilitas APIP yang berintegritas.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Berdasarkan rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2021 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto selaku APIP, maka kebutuhan dana yang diusulkan untuk pendanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mengcover kelancaran dalam mencapai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 2.3 (Tabel T-C 31 pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Mojokerto	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	100%	15.241.305.745,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kab. Mojokerto	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	100%	14.253.210.977,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Prosentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	40.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Prosentase indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	40.000.000,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,00%	13.672.185.425,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	87,00%	12.755.090.657,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	61 orang	55.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	IP ASN Perangkat Daerah	61 orang	55.000.000,00	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	75,00%	785.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	75,00%	705.000.000,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai kebutuhan	75,00%	264.120.320,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai kebutuhan	75,00%	273.120.320,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90,00%	425.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	90,00%	425.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Mojokerto	Persentase Tindak Lanjt Hasil Pengawasan	87%	2.693.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Kab. Mojokerto	Persentase Tindak Lanjt Hasil Pengawasan	87%	2.688.000.000,00	
7	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	216 Laporan	2.018.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	216 Laporan	2.053.000.000,00	
			Prosentase penyelesaian TLHP	86%				Prosentase penyelesaian TLHP	86%		
			Jumlah Pelaksanaan RAKORWAS	7 Kali				Jumlah Pelaksanaan RAKORWAS	7 Kali		
8	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	675.000.000,00	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	635.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerugian Negara	2 Kali				Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerugian Negara	2 Kali		
			Jumlah Persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	85%				Jumlah Persentase penanganan permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat	85%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	2 Kali				Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik	2 Kali		
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Mojokerto	Level Kapabilitas APIP	Level 3	3.404.300.000,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kab. Mojokerto	Level Kapabilitas APIP	Level 3	3.404.300.000,00	
9	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang (APIP)	65 Orang	792.500.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang (APIP)	65 Orang	792.500.000,00	
			Jumlah Dokumen	3 Dokumen				Jumlah Dokumen	3 Dokumen		
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	6 Kali				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	6 Kali		
10	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen	301 Dokumen	2.611.800.000,00	Pendampingan dan Asistensi	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen	301 Dokumen	2.611.800.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	128 Kali				Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	128 Kali		
TOTAL					21.338.605.746,00	TOTAL					20.345.510.977,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand design reformasi birokrasi 2010 – 2025, Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama. Reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan turunannya pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2020, maka sesuai amanat pada kedua peraturan tersebut yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu :

- a. Meningkatnya Instansi Pemerintah yang memperoleh Opini WTP dari BPK, yang terdiri atas kebijakan:
 - 1) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong sinergi antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum
 - 2) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan
 - 3) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus.
- b. Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan, yang terdiri atas kebijakan:
 - 1) Penyelesaian RUU Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 2) Kebijakan Revitalisasi Peran APIP
 - 3) Pengembangan sistem pengaduan nasional yang terintegrasi
 - 4) Perumusan Kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan KKN, seperti whistleblowing system, pengendalian gratifikasi, pengaturan konflik kepentingan
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Kabupaten Mojokerto pada dasarnya adalah penjabaran lebih teknis dari dokumen Renstra Inspektorat Tahun 2021 – 2026 melalui Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui program kegiatan setiap tahunnya guna untuk mencapai visi selama 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran menspesifikasi indikasi dari keberhasilan kinerja di masing-masing tujuan.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Kabupaten Mojokerto merumuskan tujuan dan sasaran yang terkait dengan capaian Misi Kepala Daerah yang terkait :

A. Tujuan

Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.

B. Sasaran

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Inspektorat
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, dan transparan serta meningkatnya kapabilitas APIP.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana kerja yang lebih operasional untuk kurun satu tahun yaitu 2022, meliputi program, kegiatan, sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mojokerto untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto dalam lima tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama tahun 2022 sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Inspektorat Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 :

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan kegiatan perangkat Daerah tahun 2022
Prakiraan Maju rencana tahun 2023
Kabupaten Mojokerto

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2023						
			lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana / pagu indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
6	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang													
6	01	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah												
6	01	0.00	0.00	01	00	Inspektorat Kabupaten								
6	01	0.00	0.00	01	00	Inspektorat Kabupaten								
6	01	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Kabupaten Mojokerto	83,14 (A)	14.253.210.977	APBD		83,16 (A)	16.308.197.148
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	40.000.000	APBD		100%	42.800.000
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu	Inspektorat Kab. Mojokerto	93%	12.755.090.675	APBD		94%	14.629.238.406
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaa Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	2273.120.320	APBD		100%	282.608.742

Kode					Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2023	
							lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana / pagu indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam konisi baik	Inspektorat Kab. Mojokerto	94%	425.000.000	APBD		95%	454.750.000
6	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Inspektorat Kab. Mojokerto	61	55.000.000	APBD		62	58.850.000
6	01	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum	Inspektorat Kab. Mojokerto	100%	705.000.000	APBD		100%	839.950.000
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Kabupaten Mojokerto	87%	2.688.000.000	APBD		87%	2.881.510.000
6	01	02	2	01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pengawasan Internal - Persentase Penyelesaian TLHP - JUmlah Pelaksanaan RAKORWAS 	Inspektorat Kab. Mojokerto	477 Laporan 85 % 7 Kali	2.053.000.000	APBD		477 Laporan 85 % 7 Kali	2.187.510.000
6	01	02	2	02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertent - Jumlah Pelaksanaan Penanganan kerugian Negara - Presentase penanganan 	Inspektorat Kab. Mojokerto	24 Laporan 6 Kali 85% 4 Kali	635.000.000	APBD		24 Laporan 6 Kali 86% 4 Kali	694.000.000

Kode	Urusan / bidang urusan pemerintah daerah dan Program / kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Rencana Tahun 2022				catatan penting	Prakiraan maju rencana tahun 2023	
			lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana pagu indikatif	sumber dana		Target capaian kinerja	kebutuhan dana / pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		permintaan audit investigasi dan pengaduan masyarakat - Jumlah Pelaksanaan kegiatan operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik							
6	01 03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kabupaten Mojokerto	3	3.404.300.000	APBD		3	3.642.601.000
6	01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - Jumlah Dokumen - JUmlah Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	4 Dokumen 10 Kali	792.500.000	APBD		4 Dokumen 10 Kali	847.975.000
6	01 03 2 02	Pendampingan dan Asistensi - Jumlah Dokumen - JUmlah Pelaksanaan Kegiatan	Inspektorat Kab. Mojokerto	301 Dokumen 128 Kali	2.611.800.000	APBD		301 Dokumen 128 Kali	2.794.626.000
					20.336.510.977				22.832.308.148

Sumber : Perencanaan, 2021

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Mojokerto, maka perlu disusun Rencana Kerja dan Pendanaannya. Adapun rencana kerja dan pendanaan Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sebesar Rp. **20.345.510.977,-** (Duapuluh milyar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sebagaimana tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022
Kabupaten Mojokerto

Nama OPD : Inspektorat

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	L		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	100%	Kabupaten Mojokerto	14.253.210.977	-	0	-	0	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	L	Prosentase Indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		100%	Kabupaten Mojokerto	40.000.000	-	0	-	0	-
		Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan		4 Dokumen		20.000.000					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Kinerja		4 Dokumen		20.000.000					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	L	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		93%	Kabupaten Mojokerto	12.755.090.657	-	0	-	0	-
		Penyediaan gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Laporan		14 laporan		12.735.090.657					
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Laporan		12 Laporan		20.000.000					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	L	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan		100%		273.120.320	-	0	-	0	-
		Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah paket pengiriman jasa surat menyurat, peranko dan materai		500 Paket		9.000.000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik			jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan		120.800.000					
		Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor			Jumlah Laporan Penyediaan jasa tenaga kerja selama 1 Tahun		12 orang/bulan,		143.320.320					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	L	Prosentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		94%		425.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan yang terbayarkan pajaknya		14 Unit		12.000.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan			Jumlah kendaraan yang terpelihara		14 Unit		150.000.000					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya			- Jumlah Gedung yang diperbaiki; - JUmlah Gedung Kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik		1 Unit Komplek		233.000.000					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya			JUmlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik		60 unit		30.000.000					
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	L	IP ASN Perangkat Daerah		61		55.000.000	-	0	-	0	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas dan kelengkapannya		67 Set		55.000.000					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	L	Porsentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan		100%		705.000.000	-	0	-	0	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen instalasi listrik		30 Unit		10.000.000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					/penerangan bangunan kantor yang disediakan									
		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : laptop, PC, LED, printer dll		30 unit		200.000.000					
		Penyediaan bahan Logistik Kantor			Jumlah waktu penyediaan makan dan minuman		12 Bulan		40.000.000					
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		12 paket		75.000.000					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pereundang-undangan			Jumlah surat kabar dan bahan lainnya		65 eksemplar		10.000.000					
		Penyediaan bahan/material			Jumlah ATK yang disediakan		1 paket		165.000.000					
		Fasilitasi Kunjungan tamu			Jumlah Waktu Penyediaan makan minum		12 Bulan		20.000.000					
		Penyelenggraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah		12 Bulan		200.000.000					
2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	L		Porsentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	87%		2.688.000.000	-	0	-	0	-
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	L	- Jumlah Laporan Pengawasan Internal - Persentase Penyelesaian TLHP - Jumlah Pelaksanaan RAKORWAS		- 477 Laporan - 85% - 7 Kali	Kabupaten Mojokerto	2.053.000.000	-	0	-	0	-

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			jumlah obyek pemeriksaan yang di audit kinerja		4 LHP		150.000.000					
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Jumlah Laporan hasil Pemeriksaan dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		116 Laporan		450.000.000					
		Reviu Laporan Kinerja			Jumlah Laporan Hasil Reviu		50 Laporan		167.500.000					
		Reviu Laporan Keuangan			Jumlah Laporan Hasil Reviu		8 Laporan		205.000.000					
		Pengawasan Desa			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		299 Obrik		630.000.000					
		Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			- Persentase penyelesaian tindak lanjut Rekomendasi BPK-RI - Jumlah plekasnaan Rapat Koordinasi Pengawasan dalam rangka tindak lanjut hasil Pemeriksaan APIP, Rakorwas tingkat Provinsi dan Nasional		90% 7 Kali		450.500.000					
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	L	- Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - Jumlah Pelaksanaan Penanganan Kerugian Negara - Jumlah Persentase penanganan permintaan audit		24 Laporan 6 Kali 85% 4 Kali		635.000.000	-	0	-	0	-

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					investigasi dan pengaduan masyarakat - Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik									
		Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			- Jumlah Laporan Penanganan Gratifikasi yang disampaikan ke KPK - Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyelsaian Kerugian Negara		4 Laporan 6 Kali		235.000.000					
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			- Jumlah Laporan Pengawasan dengan tujuan tertentu - Jumlah Pelaksanaan penangana kerugian negara - Persentase Penanaganan permintaan audit investigasi dan pengaduan Masyarakat - Jumlah pelaksanaan kegiatan operasional Sekretaris Majelis Pertimbangan Kode Etik		20 Laporan 85% 4 Kali 4 kali		400.000.000					
3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	-	L		Level Kapabilitas APIP	3+		3.404.300.000	-	0	-	0	-
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	L	- jumlah dokumen - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		4 dokumen 10 Kali		792.500.000	-	0	-	0	-

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			- Jumlah Dokumen Penilaian Kapabilitas APIP - Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan Pengawasan		2 Dokumen 2 Dokumen		217.500.000					
		Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi Penagawasan			- Jumlah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah yang mengikuti diklat - Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapsitas APIP - Jumlah pelaksanaan penilaian DUPAK Jabatan Fungsional, P2UPD dan Auditor		58 orang 2 Kali 4 Kali		575.000.000					
		Pendampingan dan Asistensi	-	L	- Jumlah Dokumen - JUmlah Pelaksanaan kegiatan		301 dokumen 128 Kali		2.611.800.000	-	0	-	0	-
		Pendampingan dan asitensi Urusan Pemerintahan Daerah			- Jumlah Laporan Hasil Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah - JUmlah Laporan Monev Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender		132 LHR 20 LHE 48 Laporan 18 Kali 2 Kali		1.160.800.000					

NO	KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	RP	D/TB/DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					- Jumlah Pelaksanaan Pemtaan Resiko pada OPD									
		Pendampingan Asistensi, Verivikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi			- Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi - JUmlah OPD yang telah ditetapkan sebagai WBK/WBBM		48 OPD 12 OPD		350.000.000					
		Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verivikasi pencagahan dan Pemberantasan Korupsi			- Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi anti KORupsi - Jumlah Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi d An Tindak Lanjut SABER PUNGLI		48 Kali 41 Laporan 48 Kali		952.500.000					
		Pendampingan Asistensi dan Verivikasi Penegakan Integritas			Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Survey Penilaian Integritas		12 Kali		148.500.000					
JUMLAH TOTAL									20.345.510.977	-	0	-	0	-

Sumber : Perencanaan, 2021

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021– 2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Mojokerto tahun 2021 – 2026. Sedangkan landasan operasional berdasarkan dokumen perencanaan tahunan bagi perangkat daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun *action plan* yaitu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) dalam rangka hal tersebut Inspektorat Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai sasaran program.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya penguatan birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif.

Mojokerto, 2021

Plt. INSPEKTUR

KABUPATEN MOJOKERTO

